



Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penggunaan Label Halal Bagi Pedagang

Rofiqo Meili Mahera¹, Rizda Octaviani², Rifqul Afif³

¹²³Program Studi Ekonomi Syariah, STES Manna Wa Salwa Tanah Datar

¹ Rofiqomeilim@gmail.com, ²rizdaoctavianiocha@yahoo.com, ³rifqul15.89@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemerintah sudah melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang serta menyediakan pendamping pph bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal bagi produk nya. Upaya yang digunakan pemerintah dalam meningkat kan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang yaitu dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, pelatihan serta menggratiskan pengurusan sertifikat halal bagi pedagang padang panjang mulai dari 2023 sampai dengan oktober 2024. Tidak luput pula dari perhatian pemerintah untuk menggunakan banner dan media sosial yang banyak di manfaatkan saat ini seperti instagram dan sebagainya untuk menyebar informasi mengenai sosialisasi sertifikat halal. Pemerintah juga menegaskan kan bagi pelaku usaha mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian agama pusat tentang 3 kategori produk yang harus memiliki sertifikat halal mulai 17 oktober 2024. Kesadaran pelaku usaha terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Padang Panjang sudah terlihat dengan ada nya beberapa pelaku usaha mulai menyiapkan syarat NIB dan mendaftarkannya, karena NIB adalah salah satu syarat pengurusan sertifikat halal.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah, Kesadaran, Sertifikat Halal

ARTICLE INFO

Submit	dd-mm-yyyy	Review	dd-mm-yyyy
Accepted	dd-mm-yyyy	Published	dd-mm-yyyy

INTRODUCTION

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari hubungan sesama makhluk hidup, untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan makhluk hidup sangatlah beragam, maka secara pribadi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan yang lain. Dalam melengkapi kebutuhan makhluk sosial ditemukan aturan yang menjabarkan hak dan kewajiban keduanya menurut kesepakatan bersama. Salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi diperlukan teknik, syarat dan aturan main yang harus dipenuhi, bagaimana perilaku pemenuhan kebutuhan dan apa yang seharusnya dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan. Islam menetapkan ketentuan mengenai Muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, sistem gadai dan sebagainya (Mas'adi, 2002, p. 12).

Diketahui besarnya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup menyebabkan terjadinya berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjual belikan. Pada era yang berkembang banyak sekali pembisnis panganan yang ditemui dimanapun saat ini. Bisnis ini sangatlah menjanjikan para pengusaha, karena dengan omset yang cukup besar dan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal (Durrotunnafisah, 2019, p. 58).

Hal ini merupakan salah satu peluang besar bagi pengembangan industri halal khususnya di bidang makanan dan minuman halal. Makanan halal dan minuman halal di dalam Masterplan Ekonomi Syariah merupakan produk yang telah lewat sistem sertifikasi halal yang ditandai dengan adanya label halal pada kemasan. Bagi muslim, label halal berarti produk tersebut telah mencukupi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syariah supaya layak dikonsumsi (Rahmah Yulisa Kalbarini, 2022, p. 26).

Kota Padang panjang merupakan sebuah kota kecil dengan julukan serambi mekah, Padang Panjang berperan sebagai simpul Sumatera dalam aktivitas perdagangan dan pusat kegiatan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam (Zulfikri, 2022, p. 1). Pemerintah Kota Padang panjang sangat mendukung dan peduli terhadap pembisnis makanan yang terdapat di kota Padang panjang. Hal ini dapat memicu kecenderungan ketidak stabilan harga bahan mentah di pasaran pada saat ini. Tidak menutup kemungkinan para pedagang mengambil jalan pintas tanpa memperhatikan kehalalan dan kesehatan makanan yang akan diproduksinya. Mulai tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administrasi, hingga penarikan barang dari peredaran.

Penulis mengamati kebanyakan pedagang belum paham dengan pelabelan halal pada produk dan produk dipasar kuliner padang panjang belum ada label halal, ada yang masih dalam proses pengurusan sertifikat halal. Kesadaran pedagang terhadap penggunaan label halal pada produk masih kurang dikarenakan kebanyakan dari pedagang belum paham dengan pengurusan label halal (Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 15 maret 2023).

Penelitian Faridatun Nikmah membahas tentang prosedur sertifikasi halal, penetapan fatwa halal, dan bagaimana sosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Penelitian Anisa Cahaya Pratiwi membahas tentang mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal, akibat hukum pencantuman sertifikasi halal dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan. Penelitian Ricky Prabowo membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal LPPOM MUI dan tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana upaya

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang.

RESEARCH METHODOLOGY

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang di pasar kuliner Padang Panjang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2023 dan berlokasi dipasar kuliner Padang Panjang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Di dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu pedagang pasar kuliner Padang Panjang, Bidang pengelolaan pasar padang panjang, Kementrian agama Padang Panjang, Dinas koperindag Padang Panjang dan yang menjadi Sumber Data Sekunder yaitu dokumentasi berupa foto dan audio perekam. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi). Hal ini menunjukkan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya.

RESULT AND DISCUSSION

1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang di pasar kuliner Padang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah kota padang panjang melakukan penyuluhan dan pelatihan serentak pada tanggal 18 maret 2023 kepada pedagang terkhusus nya produk makanan yang di olah langsung oleh pedagang seperti di pasar kuliner padang panjang dan pemerintahan juga membuat program sertifikasi gratis mulai 2023 sampai oktober 2024, Ada tiga kategori yang harus memiliki sertifikat halal mulai 17 oktober 2024 seperti makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan jasa penyembelihan.

Tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah padang panjang dalam menuju sertifikat halal bagi pelaku usaha yang ada di kota padang panjang seperti penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 18 maret 2023 dilaksanakan dikampus STAI Imam Bonjol Padang Panjang dan Masjid Pondok Pesantren Serambi Mekkah, pelatihan dan penggratisan pengurusan sertifikat halal yang di bantu langsung oleh pendamping pph dilaksanakan mulai dari 2 januari 2023 terbuka untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil. Dalam praktek dilapangan pemerintahan kota padang panjang bekerja sama dalam mewujudkan produk halal yang di konsumsi oleh konsumen baik dari makanan, minuman maupun bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha, pemerintah berharap dengan upaya yang mereka lakukan bisa membawa pelaku usaha lebih sadar akan kehalalan produk yang mereka pasarkan.

Padang Panjang sedang menjalankan program menuju sertifikat halal untuk seluruh pelaku usaha baik skala besar maupun kecil namun masih dalam proses karena seluruh program yang dijalankan memiliki beberapa tahapan menuju hasil yang maksimal, Program tersebut dibuat agar pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki rasa aman terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Kota padang panjang memiliki 8 orang pendamping pph agar memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, Kasi bimas islam berharap bahwa upaya yang dilakukan pemerintahan membuahkan hasil dan membawa dampak baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dan pelaku usaha yang mengikut penyuluhan yang diadakan serentak oleh kementrian agama seluruh indonesia di

daerah masing-masing mengalami peningkatan dari tahun lalu. Pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai sertifikat halal kepada pelaku usaha dipasar kuliner dengan mengarahkan pelaku usaha yang belum memiliki NIB agar segera mengurus dan mendapatkan nya karena syarat untuk memiliki sertifikat halal adalah harus mempunyai NIB (Nomor induk berusaha), seperti yang di ketahui Dinas koperindag, hanya beberapa pelaku usaha di pasar kuliner yang baru memiliki NIB dikarenakan tahun-tahun sebelumnya pemerintah masih lengah dengan pelaku usaha yang belum memiliki NIB namun mulai awal 2023 pemerintah menegaskan kembali agar program padang panjang menuju sertifikat halal dapat berjalan sebagai mana mestinya mulai dari menghimbau pelaku usaha untuk mengurus NIB serta naik ketingkat pengurusan sertifikat halal.

(Sumber: Wawancara dengan bapak John Hendri selaku kasi bimas islam kementrian agama Padang Panjang, 12 juli 2023) (Sumber: Wawancara dengan ibu Muharnis selaku staff koperasi Dinas koperindag, 12 juli 2023)

2. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya sertifikat halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diketahui bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikat halal sudah mulai terlihat dengan ada nya beberapa pelaku usaha yang mulai mengikuti sosialisasi sertifikat halal dan mulai mengurus NIB yang mana sebagai syarat utama dalam pengurusan label halal.

Pada tanggal 18 maret 2023 Kementrian Agama Padang Panjang mengadakan sosialisasi sertifikat halal, beberapa pelaku usaha dipasar kuliner mengikuti kegiatan tersebut agar mengetahui maksud dan tujuan dari sertifikat halal. Kegiatan sosialisasi tersebut di pimpin langsung oleh bapak John Hendri selaku Kasi bimas islam Kementrian Agama Padang Panjang. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah membuka pendaftaran sertifikat halal gratis (SEHATI) 2023 sampai dengan oktober 2024. Dengan ada nya sosilaisasi sertifikat halal membantu pelaku usaha terkhususnya pedagang pasar kuliner untuk mengetahui apa saja yang harus dimiliki pelaku usaha agar memberikan rasa aman kepada konsumen. Namun dengan adanya kegiatan tersebut juga membuat Pemerintah tahu masih banyak pedagang yang belum memiliki NIB jadi banyak manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut bukan hanya pelaku usaha tapi Pemerintah juga.

Dengan adanya penegasan dari pemerintah kepada pelaku usaha terkhusus nya di pasar kuliner untuk memiliki sertifikat halal membuat pelaku usaha sadar akan penting nya kehalal dari produk yang di pasarkan namun yang menjadi kendala adalah pelaku usaha harus memiliki NIB sedangkan kebanyakan dari pelaku usaha dipasar kuliner belum memiliki NIB, pengurusan memakan waktu yang cukup lama dan beberapa syarat masih belum lengkap. Saat pengurusan NIB pelaku usaha juga mengeluhkan salah satu persyaratannya yaitu NPWP, kebanyakan pedagang tidak memiliki NPWP kecuali pedagang yang sudah pernah. Beberapa kendala tersebut membuat pelaku usaha masih ada yang belum memiliki NIB. Dari lima informan yang peneliti wawancara masing-masing informan memiliki kendala sendiri, yang paling umum adalah waktu, karena rata-rata informan sudah mulai menyiapkan jualannya dari pagi hingga siang dan sore hari mulai membuka lapaknya. Namun setiap informan sudah memiliki rencana untuk mengurus sertifikat halal sebelum program penggratisan yang diadakan Pemerintah berakhir pada oktober 2024.

Dengan adanya sertifikat halal pelaku usaha dipasar kuliner Padang Panjang berharap kedepan nya penjualan bisa lebih meningkat lagi dan stabil karena sudah ada label halal nya tapi semua kembali lagi ke konsisten penjualan jika sudah memiliki target pasar maka harus

mempertahan kan kualitas produk jangan mentang-mentang sudah ada label halal kualitas menurun. Semenjak pandemi penjualan menurun baru akhir tahun 2022 penjualan mulai membaik jadi pedagang berharap program yang diadakan oleh Pemerintah bisa membuahkan hasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pedagang pasar kuliner padang panjang jika dilihat respon dan tanggapan dari pedagang yang sudah lama mau pun baru berjualan, kesadaran pedagang mulai meningkat namun ada beberapa kendala yang masih membuat pedagang belum mendaftarkan sertifikat halal terhadap produk nya dan upaya pemerintah memiliki peran penting terhadap kesadaran pedagang dalam memahami maupun pengurusan sertifikat halal, pedagang sudah mulai melengkapi persyaratan pengurusan sertifikat halal seperti mengurus NIB terlebih dahulu.

(Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar kuliner Padang Panjang, 16 dan 18 juli 2023)

Menurut pandangan peneliti, upaya yang sudah pemerintah lakukan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan label halal adalah pemerintah melakukan penyuluhan atau sosialisasi, pelatihan serta penggratisan pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha terkhususnya makanan dan minuman. Kesadaran pedagang terhadap penggunaan label halal sudah mulai meningkat dengan adanya pedagang yang mendaftarkan NIB karena NIB adalah salah satu syarat mendapatkan sertifikat halal.

CONCLUSION

Pemerintah sudah melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang serta menyediakan pendamping pph bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal bagi produk nya. Upaya yang digunakan pemerintah dalam meningkat kan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang yaitu dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, pelatihan serta menggratiskan pengurusan sertifikat halal bagi pedagang padang panjang mulai dari 2023 sampai dengan oktober 2024. Tidak luput pula dari perhatian pemerintah untuk menggunakan banner dan media sosial yang banyak di manfaatkan saat ini seperti instagram dan sebagainya untuk menyebar informasi mengenai sosialisasi sertifikat halal. Pemerintah juga menegaskan kan bagi pelaku usaha mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian agama pusat tentang 3 kategori produk yang harus memiliki sertifikat halal mulai 17 oktober 2024. Kesadaran pelaku usaha terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Padang Panjang sudah terlihat dengan ada nya beberapa pelaku usaha mulai menyiapkan syarat NIB dan mendaftarkannya, karena NIB adalah salah satu syarat pengurusan sertifikat halal.

REFERENCES

- Durrotunnafisah, C. W. (2019). Labelisasi Halal Illegal pada Praktik Jual Beli Produk Pangan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Mas'adi, G. (2002). Fikih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Rahmah Yulisa Kalbarini, R. A. (2022). Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1, 26.
- Zulfikri, B. (2022). Identitas Visual Kampung Budaya Dan Religi Sigando Padang Panjang. FBS Universitas Negeri Padang, Indonesia ,Vol. 12No. 2, 2022.



Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2023).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

